

# Kampus dan Korupsi di RI

MA'MUN MUROD AL-BARBASY, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Praktik politik koruptif, sejatinya bisa dieliminasi bila elite politik negeri ini mempunyai kemauan politik.

**P**ernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Moh Mahfud MD, (biasa saya memanggilnya Prof Mahfud) saat memberikan sambutan pada pelantikan rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021, mengundang polemik.

Prof Mahfud menyatakan, sekarang ini universitas menjadi terdakwa utama dalam kerumitan Indonesia, termasuk terkait banyaknya korupsi yang dinilai lebih parah daripada era Orde Baru. Universitas dinilai mempunyai andil, karena pelakunya lulusan perguruan tinggi.

Saya tak tertarik masuk polemik pro dan kontra, tetapi mencoba memberikan perspektif lain. Saya cukup bisa memahami apa yang disampaikan Prof Mahfud. Faktanya, kebanyakan koruptor alumnus kampus.

Namun, kalau melihatnya lebih komprehensif, dunia kampus sejatinya hanya salah satu variabel, itu pun bukan variabel determinan. Variabel determinan justru dari luar dunia kampus, yaitu sistem politik yang sangat liberal dan cengkeraman kaum oligarki ekonomi.

Kalau melakukan komparasi dunia kampus era Orde Baru dengan era kini, semakin menegaskan kampus bukan variabel determinan atas banyaknya kasus korupsi. Pada Orde Baru, aksi demonstrasi mahasiswa, baik intra maupun ekstrakampus masih dominan diwarnai idealisme.

Kalaupun ada yang suka "membelokkan" arah aksi, paling hanya di lingkup elite, jumlahnya sangat sedikit. *Mainstream* aksi tetap masih senapas dengan idealisme gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan nan kritis. *Positioning*-nya jelas: kritisi negara

sehingga selalu menggambarkan *vis a vis* mahasiswa versus negara.

Bandingkan dengan aksi mahasiswa saat ini. Terkadang justru sebaliknya, terjadi *vis a vis* mahasiswa versus mahasiswa atau bahkan, mahasiswa versus sekelompok masyarakat. Ini tentu memprihatinkan.

Organisasi mahasiswa intrakampus terbelah. Saat ini selain ada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), terdapat BEM Nusantara. Di lingkup BEM SI ataupun BEM Nusantara, terjadi perpecahan antara yang mendukung dan menolak rezim ini.

Kondisi organisasi ekstrakampus pun demikian. Dalam beberapa tahun terakhir, nyaris tak terdengar suara garang atau kritis.

Mereka seperti mengidap *silent culture*. Kalaupun ada suara kritis, hanya datang dari tingkat komisiariat.

Kongres atau muktamar organisasi mahasiswa ekstrakampus pada era Orde Baru masih penuh idealisme, tidak demikian sekarang. Adanya upaya intervensi dan penaklukan oleh penguasa Orde Baru, harus diakui. Namun, tak mudah

bagi penguasa melakukannya.

Organisasi mahasiswa masih penuh idealisme sehingga sulit ditaklukkan penguasa saat itu. Bandingkan dengan saat ini. Kongres atau muktamar organisasi ekstrakampus, termasuk organisasi kepemudaan, sudah seperti partai politik.

Uang betebaran di arena kongres atau muktamar. Lebih menyedihkan, kini permainan politik uang masuk di lingkup permusyawaratan BEM di beberapa kampus. Sulit disangkal, elite politik (berkuasa) terlibat dalam proses politik tersebut.

Terjadi simbiosis-mutualisme. Elite politik (berkuasa) merasa perlu "mengendalikan" ketua umum organisasi intra atau ekstrakampus dan organisasi kepemudaan agar

tidak mengganggu perguliran kebijakan politik penguasa.

Sebaliknya, sang kandidat ketua umum membutuhkan "logistik" untuk sukses menggapai jabatan ketua umum. Jadi, seperti tutup bertemu botolnya.

## Butuh keseriusan

Apa yang disampaikan Prof Mahfud, bukan hal baru. Bahasa senada sering dinyatakan banyak tokoh. Bahkan, solusinya juga ditawarkan banyak pihak. Beberapa, memberikan solusi untuk amendemen UUD 1945, terutama terkait pemilihan presiden (Pasal 6A).

Lainnya, penghapusan kebijakan terkait *presidential threshold* dan *parliamentary threshold*, serta mengembalikan ke nomor urut calon legislatif dalam penentuan anggota legislatif, yang terbukti menjadi pintu masuk bagi maraknya korupsi.

Empat hal di atas terbukti menciptakan politik berbiaya mahal. Untuk menjadi presiden butuh biaya tak sedikit, yang mustahil dipenuhi seorang calon presiden beserta pasangannya. Begitu juga menjadi anggota legislatif, gubernur, bupati/wali kota.

Dalam perspektif *rent seeking theory*, pembuatan perundang-undangan politik itu sengaja dilanggengkan oleh dan untuk kaum oligarki ekonomi dan politik. Perilaku *rent seeking* merupakan fenomena budaya korupsi baru di Indonesia sejak era reformasi.

Budaya korupsi ini terjadi di kalangan pejabat publik, politisi yang berkolaborasi dengan kaum oligarki ekonomi, yang berkepentingan dalam menyiasati celah kebijakan publik untuk kepentingan melayani dan memperkaya diri sendiri.

Praktiknya bisa mulai dari jual-beli jabatan, pengalokasian anggaran atas proyek pemerintah, termasuk kompromi politik dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, kompromi politik menjelang perhelatan politik lima tahunan.

Praktik politik koruptif ini, sejatinya bisa dieliminasi bila elite politik negeri ini mempunyai kemauan politik. Problemmnya, mereka terlihat begitu nyaman dengan *status quo* politik saat ini. ■



DAAN YAHYA/REPUBLICA